

ISU STRATEGIS KOMUNIKASI POLITIK DI KALANGAN ELITE DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH

Strategic Issues in Political Communication Among Local Elites on The Formation Process of Central Luwu Regency

Ibrahim Umar,
Hafied Cangara¹, A. Samsu Alam²

^{1,2}. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin
Email: ipiumar@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) isu aktual apa saja diinginkan oleh elite daerah terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, dan (2) peran elite daerah dalam mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, terkhusus di wilayah calon Kabupaten Luwu Tengah dan di wilayah Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memfokuskan pada deskripsi tentang isu strategis di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, dan yang menjadi data kualitatifnya adalah hasil wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis dengan cara melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) sejumlah variabel yang berkenaan dengan isu strategis yang berkembang di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan peran elite daerah selama proses pemekaran berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu-isu strategis sebagai alasan untuk mendorong pemekaran Kabupaten Luwu Tengah meliputi: rentang kendali pemerintahan, ketimpangan dalam pembangunan, akses pelayanan, instrumen kebijakan, terwujudnya Tana Luwu sebagai Provinsi dan faktor kepentingan elite. Bahwa komunikasi politik yang terjadi di kalangan elite daerah calon Kabupaten Luwu Tengah masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, proses politik yang terjadi lebih lama berada di arena kerangka konflik, hal ini dibuktikan dengan adanya faksi-faksi yang ada di kalangan elite daerah, sehingga sampai sekarang belum terjadi konsensus atau kompromi politik yang lebih bertujuan dalam rangka mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Kata kunci: *Isu, komunikasi, politik, elite, pemekaran daerah.*

Abstract

This research aims to determine (1) the actual issues evolving and wished by local elites related to expansion of Central Luwu Regency, (2) the role of local elites in encouraging the acceleration of Central Luwu Regency expansion, (3) communication patterns among local elites in the underway process of Luwu Regency formation. The research was conducted in Luwu Regency, particularly in the prospective area of Central Luwu Regency and in Makassar. The method used in this research is descriptive qualitative, i.e. focusing on the description of the strategic issue among local elites in the formation process of Central Luwu Regency. The qualitative data is the interview result with informants chosen through purposive sampling method. Data is analyzed through depicting or describing (description) a number of variables that dealt with strategic issues which developed among the local elite in the formation process of Central Luwu Regency and the roles of local elites during the underway process of expansion. Results of this study indicate that the strategic issues as an excuse to encourage the expansion of Central Luwu Regency includes: full range of governance, inequalities in development, access to services, policy instruments, the realization of Tana Luwu to be a province and factor of elite interests. Political communication that occurs among the local elite in the prospective Central Luwu Regency is still dominated by private and group interests; the political process is going on a lot longer

as political conflict. This is proved by the existence of factions that exist among local elites, hence until now a concensus or compromise which aims to speed up the formation of Central Luwu Regency has not happened yet.

Keywords: *Issue, communication, political, elite, expansion of area.*

PENDAHULUAN

Komunikasi politik sebagai *instrument* penting dalam mendorong dan mengawal proses kebijakan politik diharapkan mampu terapkan dengan baik. Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperasian lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, Dahlan yang mengutip Mansfield dan Weaver memberikan gambaran tentang unsur-unsur dalam komunikasi politik, yakni; sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima, dan efek (Cangara, 2009). Gambaran inilah yang menjadi titik tolak dari penelitian ini terkait unsur-unsur dalam komunikasi politik seperti yang diuraikan di atas yaitu terkait pesan politik (dalam hal ini: isu) dan aktor (elite) dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Dari pengertian yang ada di atas, dapat diuraikan bahwa pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik,

propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa tubuh (*body language*), dan sebagainya.

Isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari para elite politik, sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan. Oleh karena itu kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan suatu isu agar masuk ke agenda kebijakan, seperti misalnya mobilisasi diri, mencari dukungan kelompok-kelompok lain, maupun menggunakan media massa.

Kemudian, unsur selanjutnya yang menjadi poin penting dalam komunikasi politik adalah terkait dengan aktor. Aktor (baca : Elite) sebagai bagian terpenting dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat untuk mendorong dan mengawal proses kebijakan sangat dituntut untuk berperan penting. Elite berdasarkan kajian teoritis yang dibangun awal-awalnya oleh Mosca dalam *The Rulling Class*, Pareto, dan Michels mempunyai beberapa prinsip-prinsip umum yaitu, *pertama*, adanya kekuasaan politik, *kedua*, secara umum masyarakat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yang berkuasa dan yang dikuasai, *ketiga*, elite bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok, *keempat*, elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, dan *kelima*, elite bersifat otonom (Kholek, 2010).

Pengertian elite memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasaan maka memunculkan dua tipe yaitu elite yang memerintah secara formal dan elite yang tidak memerintah secara formal. Misalnya

(Raymond Aron dalam Muhammad Najib, 2006) yang menaruh perhatian pada kelompok kecil yang memerintah dan keterhubungannya dengan kelas-kelas sosial. Temuan Raymond bahwa adanya kemajemukan kelompok-kelompok elite dalam masyarakat modern.

Sebagai sebuah rencana kebijakan, proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sampai hari ini banyak mengundang tanya, karena sebagaimana uraian yang ada diatas yang secara normatif meniscayakan kelayakan untuk dimekarkan dari kabupaten Luwu sebagai kabupaten induknya. Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Johan (2006) yang memberikan kesimpulan bahwa proses pemekaran Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten Luwu Tengah telah memenuhi persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Burhan (2011) yang memberikan pembuktian bahwa ada 6 (enam) faktor pendorong yang diidentifikasi terkait latar belakang sebuah pemekaran daerah yaitu sebagai berikut; (1) adanya instrumen kebijakan, (2) faktor sejarah, (3) ketimpangan dalam pembangunan, (4) sulitnya akses pelayanan, (5) sumber daya, dan (6) kepentingan elite. Tujuan umum penelitian ini adalah Untuk mengetahui isu aktual apa saja yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan menganalisis bagaimana peran elite daerah dalam mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu dan Makassar Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah *in-depth interview* (wawancara mendalam), yang bertujuan untuk melacak penilaian atau pandangan-pandangan elit daerah terkait proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah elite daerah calon Kabupaten Luwu Tengah yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Luwu, anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Mahasiswa. Sampel sebanyak 12 orang yang dipilih secara *purposive sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut ; (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara yang dimaksud adalah wawancara mendalam dengan sejumlah informan yaitu perwakilan elite daerah, (2) dokumentasi, pemerolehan data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mencari konsep-konsep dan landasan teori yang digunakan. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk membantu proses telaah dan penjelasan penemuan yang didapatkan dalam penelitian, (3) observasi, mengumpulkan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap informan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi sejumlah variabel yang berkenaan dengan isu strategis yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah dan bagaimana peran elit daerah pada proses percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Sedangkan untuk analisis data wawancara menggunakan analisis data Model Miles and Huberman

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 memperlihatkan hasil analisis tentang isu strategis yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah memperlihatkan bawah yang melatarbelakangi sehingga pemekaran daerah ini didorong adalah

UU No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Palopo menjadi Kota otonom, dan PP No. 80 Tahun 2005 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Kecamatan Belopo. Ini sesuai hasil wawancara dengan Umar Alatas tanggal 26 April 2013, Hafida Rauf tanggal 10 Mei 2013 dan Said Rasyid tanggal 19 Juni 2013.

Kemudian terkait dengan dengan isu-isu strategis yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah selama proses pembentukan Kabupaten Luwu tengah berlangsung meliputi: rentang kendali pemerintahan, ketimpangan dalam pembangunan, akses pelayanan, instrumen kebijakan, terwujudnya Tana Luwu sebagai Provinsi dan faktor kepentingan elite. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Syukur Bijak tanggal 4 Mei 2013, A. Muzakkar tanggal 13 Juni 2013, Hafida Rauf tanggal 10 Mei 2013, Umar Alatas tanggal 26 April 2013, Samsu Alam 29 Mei 2013, Rachmat Aziz 29 April 2013, dan Syahrudin Hamun 27 Juni 2013.

Pada tabel 2 memperlihatkan hasil analisis tentang peran elite daerah dalam mengawal proses percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menunjukkan yaitu; (1) pembentukan Forum Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT), (2) mengawal proses kelengkapan berkas pemekaran dari tingkat Kabupaten sampai Provinsi, (3) komunikasi yang intens dengan komisi II DPR RI dan Dirjen Otonomi Daerah terkait status pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, dan (3) pemanfaatan media massa sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*). Ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara dengan Syukur Bijak tanggal 4 Mei 2013 dan penyampaian Syukur Bijak di Harian Palopo Pos edisi Kamis 11 Juli 2013, Thomas Toba tanggal 12 Juni 2013, dan A. Muzakkar tanggal 13 Juni 2013.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa isu strategis yang berkembang selama proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah berlangsung adalah; (1) rentang kendali pemerintahan, (2) ketimpangan dalam pembangunan, (3) akses pelayanan, (4) instrumen kebijakan, (5) terwujudnya Tana Luwu sebagai provinsi dan (6) faktor kepentingan elite.

Berkaitan dengan isu-isu strategis yang dimaksud di atas, sebagaimana Sastropetro (1982) memberikan pengertian bahwa pesan (*encoding*) merupakan suatu kegiatan penting, sulit menentukan apakah gagasan yang ada dapat dituangkan secara pasti ke dalam lembaga yang berarti dan telah disusun sedemikian rupa, sehingga menghindari timbulnya salah paham.

Pandangan Sastropetro di atas dapat memberikan gambaran bahwa isu-isu strategis selama proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah berlangsung merupakan pesan dalam perspektif komunikasi, karena sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa merupakan suatu kegiatan penting karena sangat berdampak terhadap proses keberlangsungan tatanan kemasyarakatan, terutama aspek pelayanan dan rentang kendali pemerintahan.

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas adalah merupakan pesan politik yang berkembang selama proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah berlangsung. Lebih jelasnya dapat dipertegas sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Cangara (2009) bahwa pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik

dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa tubuh (*body language*), dan semacamnya. Kemudian menurut Basri (2012), pesan politik adalah isu-isu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Diyakini bahwa komunikator politik selalu merekayasa pesan politik sebelum itu disampaikan kepada komunikan. Artinya, suatu pesan tidak pernah dibuat secara sembarangan karena seluruh komunikator percaya selalu terdapat *feedback* dalam setiap komentar mereka.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan pengertian yang diuraikan Pareto (dalam Haryanto, 2005) yang menyebutkan bahwa elite politik terdiri dari dua komponen yaitu; (1) Elite Politik Lokal merupakan individu-individu yang menduduki jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilu dan dipilih dalam proses yang demokratis di tingkat lokal. Mereka yang menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat kebijakan-kebijakan politik. Elite politik itu seperti: Gubernur, Bupati dan Walikota, Pimpinan DPRD, para anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik. (2) Elite Non-Politik Lokal adalah seseorang atau individu yang menduduki jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non-politik ini seperti: elite keagamaan, elite pengusaha, elite organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta profesi dan lain sebagainya.

Kategorisasi aktor menurut Pareto di atas memiliki relevansi dengan apa yang menjadi temuan dalam penelitian ini yaitu komunikator politik yang paling dominan dalam melakukan komunikasi politik adalah elite politik lokal yang diwakili oleh Syukur Bijak sebagai Ketua Fopkalt sekaligus Wakil Bupati Luwu dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Luwu, Andi Muzakkar selaku Bupati Luwu, Hafida Rauf selaku Anggota DPRD Kabupaten Luwu.

Sedangkan dari kalangan nonpolitik adalah Thomas Toba selaku tokoh masyarakat dan Said Rasyid selaku tokoh pemuda sekaligus pengurus Fopkalt.

Menurut Astrid (dalam Arifin, 2003) bahwa komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dengan demikian melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengertian masyarakat sosial dengan lingkup negara, sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan. Sedangkan dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya faksionalisasi di kalangan elite daerah calon Kabupaten Luwu Tengah.

Dalam perspektif yang berbeda, Nimmo (2005) memberikan formulasi komunikasi politik dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial. Lebih lanjut Nimmo merumuskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Dari pendekatan teoritis yang ada, kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian, dapat diberikan gambaran bahwa komunikasi politik yang terjadi di kalangan elite daerah calon Kabupaten Luwu Tengah masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, proses politik yang terjadi lebih lama berada di arena kerangka konflik, sehingga sampai sekarang belum terjadi konsensus atau kompromi politik yang lebih bertujuan dalam rangka mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Hal lain yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah terkait pemuka pendapat sebagai komunikator politik sesuai unsur

dalam komunikasi politi. Penelusuran melalui dokumen dan wawancara yang ada memberikan pembuktian bagaimana seseorang menjadi pemuka pendapat terkait proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, yaitu intensitasnya menyampaikan pendapat terutama media massa, berstatus sosial tinggi, berpendidikan tinggi dan tingkat kemelekhurufannya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh Rogers dan Shoemakers (dalam Burhan, 2011) bahwa pemuka pendapat biasanya berbeda dari *follower* mereka dalam beberapa hal dan mereka cenderung berinteraksi dengan *follower* yang ciri-cirinya mirip dengan mereka sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai isu strategis dalam komunikasi politik di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis dan aktual sebagai pesan politik dalam unsur komunikasi politik selama proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah berlangsung meliputi: rentang kendali pemerintahan, ketimpangan dalam pembangunan, akses pelayanan, instrumen kebijakan, terwujudnya Tana Luwu sebagai Provinsi dan faktor kepentingan elite.

Elite daerah dalam melakukan perannya sebagai komunikator politik selain memperkuat komunikasi politik di kalangan sesama elite daerah, juga senantiasa menjalin komunikasi yang *intens* dalam rangka konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI yang khusus membidangi pemekaran daerah.

Hal lain yang ingin disampaikan adalah bahwa seseorang menjadi pemuka pendapat terkait proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, yaitu intensitasnya menyampaikan pendapat terutama media massa, berstatus sosial tinggi, berpendidikan tinggi. Kemudian kondisi tentang faksionalisasi yang terjadi di

kalangan elite daerah dalam proses pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. (2003). *Komunikasi Politik*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____ (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Edisi II. Yogyakarta.
- Basri, Seta. (2012). *Pengantar Ilmu Politik: An Introduction to Political Science*. Indie Book Corner. Cetakan kedua. Yogyakarta
- Burhan. (2011). *Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*. Disertasi Program Pascasarjana UNM: tidak dipublikasikan.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Cetakan ke IV. Rajawali Press. Jakarta.
- Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. (2008). *Laporan Akhir Pengkajian Persyaratan Teknis Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah*.
- Haryanto, (2005). *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*. PLOD UGM dan JIP UGM. Yogyakarta.
- Johan, Abbas. (2006). *Tinjauan Yuridis terhadap Pemekaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007: Studi Kasus Kabupaten Luwu*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Tidak dipublikasikan.
- Kholek, Abdul. (2010). *Peranan Elit Lokal dalam mewujudkan Demokratisasi di Daerah pasca Reformasi*. Online, (http://blog.unsri.ac.id/revolusi_Jalanan/artikel-politik-dan-kebijakan/peranan-elit-lokal-dalam-mewujudkan-demokratisasi-di-daerah-pasca-reformasi/mrdetail/6615/) diakses 11 Februari 2013.

Najib, Muhammad. (2006). *PILKADA dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Terjemahan. Cetakan ke-6. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Cetakan ke II. LKiS. Yogyakarta.

Sastroputro, Santoso (1982). *Komunikasi Internasional*. Sarana Interaksi, antar bangsa, Alumni, Bandung.

Lampiran**Tabel 1 : Hasil analisis tentang isu strategis yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah pada proses percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.**

Fokus Masalah	Hasil	Sumber Data
Latar belakang gagasan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah	UU No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Palopo menjadi Kota otonom, dan PP No. 80 tahun 2005 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Kecamatan Belopo	Hasil wawancara dengan Umar Alatas tanggal 26 April 2013, Hafida Rauf tanggal 10 Mei 2013 dan Said Rasyid tanggal 19 Juni 2013
Isu strategis yang diinginkan dan berkembang di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.	Rentang kendali pemerintahan, ketimpangan dalam pembangunan, akses pelayanan, instrument kebijakan, terwujudnya Tana Luwu sebagai provinsi dan faktor kepentingan elite.	Hasil wawancara dengan Syukur Bijak tanggal 4 Mei 2013, A. Muzakkar tanggal 13 Juni 2013, Hafida Rauf tanggal 10 Mei 2013, Umar Alatas tanggal 26 April 2013, Samsu Alam 29 Mei 2013, Rachmat Aziz 29 April 2013, dan Syahrudin Hamun 27 Juni 2013

Tabel 2 : Hasil analisis tentang peran elite daerah dalam mengawal proses percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Fokus Masalah	Hasil	Sumber Data
Peran elite daerah dalam mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.	Pembentukan Forum Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT), mengawal proses kelengkapan berkas pemekaran dari tingkat Kabupaten sampai Provinsi, komunikasi yang intens dengan komisi II DPR RI dan Dirjen Otonomi Daerah terkait status pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, dan pemanfaatan media massa sebagai pemuka pendapat (<i>opinion leader</i>).	Hasil wawancara dengan Syukur Bijak tanggal 4 Mei 2013 dan penyampaian Syukur Bijak di Harian Palopo Pos edisi Kamis 11 Juli 2013, Thomas Toba tanggal 12 Juni 2013, dan A. Muzakkar tanggal 13 Juni 2013